



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023



(0287) 381051



bkpdkbm@gmail.com



www.bpkpd.kebumenkab.go.id

- Jalan Pahlawan Nomor 2 Kabupaten Kebumen
- Jalan Indrakila Nomor 5 Kabupaten Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 29 DESEMBER 2023

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen;

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD:

3.1.1 LRA

3.1.2 L O

3.1.3 Neraca

3.1.4 LPE

3.1.5 CALK

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.

Bab IV Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan

Bab V Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp.167.916.944.894 atau 103,09% dari anggaran sebesar Rp.162.876.485.000 dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp162.808.119.871 naik sebesar Rp5.112.859.811 atau 3,14%. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.876.485.000	167.916.944.894	5.040.459.894	103,09	162.808.119.871
	Pendapatan Pajak Daerah	133.030.000.000	137.222.705.502	4.195.705.502	103,15	137.220.758.720
	Retribusi Daerah	221.000.000	283.648.416	62.648.416	128,35	297.418.016
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.123.337.000	19.123.340.688	3.688	100,00	19.123.340.688
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.502.148.000	11.287.250.288	785.102.288	107,48	60.951.178.534
	PENDAPATAN TRANSFER	0	0	0	0	0
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0
	Dana Perimbangan	0	0	0	0	0
	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	0	0	0
	Pendapatan Bagi Hasil	0	0	0	0	0
	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0	0
1.	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)			
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
JUMLAH		162.876.485.000	167.920.979.682	5.044.494.682	103,10	162.808.119.871

b. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.29.200.721.282 dan anggaran sebesar Rp.30.294.848.000 atau mencapai 96,39% dengan rincian belanja operasi terealisasi Rp25.367.886.782 dari anggaran sebesar Rp26.449.536.000 dan Belanja Modal terealisasi Rp3.832.834.500 dari anggaran sebesar Rp3.845.312.000.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI T.A. 2023	
		Rp	%
B. BELANJA	30.294.848.000	29.200.721.282	96,39
BELANJA OPERASI	26.449.536.000	25.367.886.782	95,91
1. Belanja Pegawai	15.373.656.000	14.448.711.016	93,98
2. Belanja Barang dan Jasa	11.075.880.000	10.919.175.766	98,59
3. Belanja Subsidi	0	0	0
BELANJA MODAL	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-

2. Realisasi Belanja Per Sub Kegiatan

KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.366.000	115.998.300	98,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.366.000	76.979.000	99,50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	39.019.300	97,55
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.479.547.000	14.556.226.324	94,04
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.282.198.000	14.362.655.156	93,98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.349.000	193.571.168	98,09

KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.724.000	193.483.993	98,35
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196.724.000	193.483.993	98,35
Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.554.000	407.274.392	98,01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000	15.970.800	99,82
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	102.011.380	97,15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.000.000	37.942.200	92,54
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.990.000	99,92
Penyediaan Bahan/Material	75.000.000	73.636.000	98,18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000	137.651.212	99,75
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.554.000	28.072.800	98,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.596.112.000	3.584.269.500	99,67
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	16.000.000	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.200.000	232.565.000	99,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.600.000	440.041.564	93,91
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.929.500	98,24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.000.000	269.823.064	90,54
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.600.000	166.289.000	99,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.000.000	519.959.487	99,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.000.000	235.553.487	99,39
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	79.445.500	99,98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	204.960.500	99,37
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.013.554.000	1.007.171.206	99,37
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.000.000	169.188.100	99,52

KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.554.000	319.317.849	98,69
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300.000.000	299.625.960	99,88
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000	149.534.876	99,69
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	70.000.000	69.504.421	99,29
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.366.000	602.701.332	96,38
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	193.683.000	190.046.300	98,12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	118.000.000	115.226.000	97,65
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.683.000	105.293.037	92,62
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200.000.000	192.135.995	96,07
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	551.366.000	544.662.729	98,78
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110.000.000	109.861.850	99,87
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.683.000	112.797.000	99,22
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	133.683.000	132.486.916	99,11

KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	170.000.000	166.334.563	97,84
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.000.000	23.182.400	96,59
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	679.659.565.000	678.046.382.004	99,76
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	730.000.000	730.000.000	100,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	663.901.079.000	663.231.376.738	99,90
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.235.728.000	341.838.385	27,66
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.792.758.000	13.743.166.881	99,64
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000	1.696.729.074	98,58
Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga	85.000.000	83.908.500	98,72
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	121.436.000	118.370.641	97,48
Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000	324.199.000	98,24
Pengamanan Barang Milik Daerah	683.554.000	678.731.911	99,29
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.178.000	137.969.300	97,73
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	110.000.000	107.526.550	97,75
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.000.000	161.574.172	97,92
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85.000.000	84.449.000	99,35
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.117.837.000	5.067.031.269	99,01
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.066.070.000	1.037.414.332	97,31
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.000.000	103.497.450	98,57
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	245.265.000	240.475.837	98,05
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	130.000.000	129.809.721	99,85
Penetapan Wajib Pajak Daerah	411.049.000	396.259.129	96,40
Penagihan Pajak Daerah	3.160.453.000	3.159.574.800	99,97
JUMLAH	709.733.959.000	707.013.986.433	99,62

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2023 antara lain :

1. Pendapatan Pajak Daerah

Secara keseluruhan target pendapatan Pajak Daerah sudah tercapai bahkan melebihi target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu sebesar Rp137.225.023.225 dari target sebesar Rp133.030.000.000, akan tetapi ada beberapa kendala dalam mencapai target pendapatan tersebut dari kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih banyak menunggu akhir tempo pembayaran sehingga harus dilakukan intensifikasi ke wajib pajak. Dari kendala yang ada tersebut perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan pagu anggaran sebesar Rp15.479.547.000 terealisasi sebesar Rp14.556.226.324 atau 94,04% dari target 100%, deviasi sebesar 5,96% menjadi salah satu deviasi yang tinggi ini dikarenakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS beberapa rekening Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang belum dicairkan di akhir tahun juga tidak diambil karena pegawai mutasi dan pensiun.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp269.823.064 dari anggaran Rp298.000.000 atau 90,54% dari realisasi yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga deviasinya sebesar 9,46% karena ada sisa belanja telepon, air dan listrik. Sisa belanja tersebut cukup besar karena sifatnya penyediaan dan menyesuaikan tagihan.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari pagu anggaran sebesar Rp.635.766.313.000 realisasi Rp.633.952.168.982 atau 99,72%. Dalam kegiatan ini terdapat 3 sub

kegiatan yaitu Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan dari sub kegiatan tersebut penyerapan anggaran yang paling rendah pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak dengan pagu sebesar Rp1.235.728.000 hanya terserap Rp341.838.385 atau sebesar 27,66% penyerapan yang rendah ini karena anggaran dana darurat ini bersifat penyediaan dan insidental, sebagai contoh ketika terjadi bencana dana ini baru dapat digulirkan. Untuk lebih meningkatkan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah ini maka perlu dioptimalkan untuk tertibnya pengalolaan dana darurat mendesak tersebut

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target. Dalam pelaksanaan kegiatannya mengalami beberapa hambatan, adapun hambatan/kendala dalam pencapaian target yaitu bahwa Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dan Verifikator tidak dapat dibayarkan, hal ini sesuai arahan BPK RI menyesuaikan regulasi yang berlaku.

Sedangkan solusi atau upaya untuk mencapai target dan menangani hambatan-hambatan tersebut akan dilaksanakan dengan rencana tindak lanjut antara lain:

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik SDM maupun anggaran yang tersedia
- Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi dengan BPKP terkait implementasi FMIS agar lebih optimal dalam penggunaannya.
- Menginventarisir dokumen-dokumen pemanfaatan aset, untuk tahap awal penyusunan database pemanfaatan
- Mengusulkan pemenuhan sarpras pendukung.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN
KEUANGAN
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan - LRA

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp162.876.485.000 Terealisasikan sebesar Rp167.916.944.894 atau 103,09 dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*) Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	162.876.485.000	167.916.944.894	5.040.459.894	103,09	162.808.119.871

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 melebihi target sebesar 103,09% dari anggaran Rp162.876.485.000 realisasi Rp167.916.944.894 naik sebesar Rp5.108.825.023 atau 3,14% dari realisasi Tahun 2022.

Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp162.876.485.000 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Pajak Daerah	133.030.000.000	137.222.705.502	103,15	137.220.758.720
Pendapatan Retribusi Daerah	221.000.000	283.648.416	128,35	297.418.016
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.337.000	19.123.340.688	100,00	19.123.340.688
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.502.148.000	11.287.250.288	107,48	60.951.178.534
Jumlah	162.876.485.000	167.916.944.894	103,09	162.808.119.871

▪ Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp. 133.030.000.000	Rp. 137.222.705.502

Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp133.030.000.000 terdiri dari:

Pendapatan Pajak Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Pajak Daerah	133.030.000.000	137.222.705.502	103,15	129.837.475.532
Pajak Hotel	2.650.000.000	2.915.673.634	110,03	2.455.684.956
Pajak Restoran	11.100.000.000	13.254.656.107	119,41	11.159.401.535
Pajak Hiburan	900.000.000	1.129.890.815	125,54	543.034.159
Pajak Reklame	2.000.000.000	2.324.243.500	116,21	2.001.768.503
Pajak Penerangan Jalan	41.600.000.000	42.269.699.527	101,61	39.261.189.956
Pajak Parkir	700.000.000	744.359.699	106,34	631.035.253
Pajak Air Tanah	380.000.000	405.744.478	106,77	451.312.560
Pajak Sarang Burung Walet	0	0	-	5.100.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000	593.014.174	84,72	702.807.750
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	56.700.000.000	56.985.271.522	100,50	56.649.407.691
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.300.000.000	16.600.152.046	101,84	15.983.132.959

▪ Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp.221.000.000	Rp.283.648.416

Anggaran Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp.221.000.000 terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	221.000.000	283.648.416	128,35	607.412.200
Jumlah	221.000.000	283.648.416	128,35	607.412.200

Pendapatan dari Retribusi terealisasi Rp.283.648.416 atau sebesar 128,35% realisasi pendapatan retribusi daerah turun sebesar 51,03% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp.607.412.200. Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2023 ini turun karena beberapa obyek sudah dialihkan pengelolaanya ke OPD Pengguna seperti Stadion Candradimuka, Stadion Karanganyar, Kasda dan ATM pada Setda Kabupaten Kebumen. Pendapatan ini dari sewa tanah dan bangunan milik Pemda yang idle (tidak digunakan oleh OPD) seperti penggunaan tanah untuk BUMD, sewa kantin, dll yang dikelola dengan perjanjian sewa.

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.19.123.337.000 terealisasi sebesar Rp.19.123.340.688 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tahun 2023 dengan target sebesar Rp.16.777.713.000 terealisasi sebesar 16.976.927.763 atau 102%.
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp.199.212.000 terealisasi Rp.0.
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) dengan anggaran Rp.2.146.412.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.146.412.925 atau 100%.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.11.287.250.288 dari anggaran sebesar Rp.10.502.148.000 atau sebesar 107,48% terdiri dari:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran 2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.076.000.000	1.299.805.879	120,80	1.109.991.362
Jasa Giro	1.934.000.000	1.941.444.932	100,38	2.205.784.880
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	37.500.000	47.704.545	127,21	42.750.000
Pendapatan Bunga	6.287.000.000	5.411.536.170	86,08	9.845.890.393
Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.000.000	403.885.062	161,55	231.123.774
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.500.000	0	-	0
Pendapatan dari Pengembalian	245.000.000	355.217.506	144,99	302.104.274
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	654.148.000	1.827.656.194	279,39	978.188.301
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	-	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	-	0
Jumlah	10.502.148.000	11.287.250.288	107,48	14.715.832.984

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 terealisasi 107,48, turun sebesar 23,29% dibandingkan Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp23.296.624.122. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang tidak melampaui target anggaran yang ditetapkan adalah Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yaitu sebesar 120,80%, Jasa Giro sebesar 100,38%, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar 127,21%, Pendapatan Denda Pajak Daerah 161,55%, Pendapatan dari Pengembalian yaitu sebesar 144,99%, Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) sebesar 279,39%.

2. Belanja - LRA

Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp29.200.721.282** atau 96,39 dari anggaran sebesar **Rp30.294.848.000** Rincian Anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2023 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	2023			Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	15.373.656.000	14.448.711.016	93,98	15.031.633.819
2. Belanja Barang dan Jasa	11.075.880.000	10.919.175.766	98,59	12.390.601.068
3. Belanja Subsidi	0	0	0	0
Jumlah Belanja Operasi	26.449.536.000	25.367.886.782	95,91	27.422.234.887
Belanja Modal				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68	3.868.250.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0	-
Jumlah Belanja Modal	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68	3.868.250.000
Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
Jumlah Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
Belanja Transfer				
Belanja Bagi Hasil	0			
Belanja Bantuan Keuangan	0			
Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA	30.294.848.000	29.200.721.282	96,39	31.290.484.887

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.2.089.763.605. Dengan rincian Belanja Operasi turun dari Rp27.422.234.887 di tahun 2022 menjadi Rp25.367.886.782 pada tahun anggaran 2023 atau sebesar 7,49% dan Belanja Modal juga turun sebesar 0,92% dari Rp3.868.250.000 di tahun 2022 menjadi Rp3.832.834.500 di tahun 2023. Turunnya realisasi belanja ini berbanding lurus dengan turunnya anggaran belanja tahun anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah baik pada Belanja Operasi maupun Belanja Modal sehingga realisasi tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2022.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sangat baik mencapai 95,91 atau sebesar Rp.25.367.886.782 dari anggaran sebesar Rp.26.449.536.000 apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 yang sebesar Rp.27.422.234.887

mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 7,49, turunnya realisasi belanja operasi ini seiring dengan anggaran belanja operasi yang juga berkurang pada tahun 2023 karena adanya refocusing.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa tahun anggaran 2023 dan 2022 tersaji dalam tabel berikut:

Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Tabel rincian realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023

BELANJA OPERASI		2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai		14.848.554.416	14.448.711.016	96,97
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.905.764.000	5.692.325.063	96,39
-	Belanja Gaji Pokok ASN	4.366.410.000	4.257.800.455	97,51
-	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	440.564.000	423.390.207	96,1
-	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	240.004.000	231.450.000	96,44
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	169.025.000	158.740.000	93,92
-	Belanja Tunjangan Beras ASN	264.375.000	246.662.520	93,3
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.977.000	11.731.034	58,72
-	Belanja Pembulatan Gaji ASN	210.000	55.170	26,27
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	363.119.000	327.729.512	90,25
-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.521.000	8.691.509	82,61
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	31.559.000	26.074.656	82,62
-	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0	-	!
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.673.740.000	4.486.039.617	95,98
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	4.673.740.000	4.486.039.617	95,98
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.431.458.000	3.938.679.510	88,88
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.330.000.000	3.849.196.510	88,90
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	10.000.000	0	-
-	Belanja Honorarium	72.758.000	72.083.000	99,07
-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	18.700.000	17.400.000	93,05
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	362.694.000	331.666.626	91,45
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	362.694.000	331.666.626	91,45
Belanja Barang dan Jasa		11.075.880.000	10.919.175.766	98,59
	Belanja Barang	3.720.826.000	3.634.714.735	97,69
-	Belanja Barang Pakai Habis	3.720.826.000	3.634.714.735	97,69

BELANJA OPERASI		2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
	Belanja Jasa	3.645.620.000	3.582.929.345	98,28
-	Belanja Jasa Kantor	3.391.890.000	3.336.483.361	98,37
-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.144.000	24.774.984	98,53
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	72.711.000	69.961.000	96,22
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	65.875.000	61.710.000	93,68
-	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000	90.000.000	100,00
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0,00
	Belanja Pemeliharaan	76.250.000	75.695.500	99,27
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.250.000	75.695.500	99,27
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	959.554.000	953.341.186	99,35
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	959.554.000	953.341.186	99,35
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.673.630.000	2.672.495.000	99,96
-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.673.630.000	2.672.495.000	99,96

2. Tabel rincian realisasi belanja operasi tahun 2022

2.1. Tabel rincian realisasi belanja operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

BELANJA OPERASI		2022		%
		ANGGARAN	REALISASI	
	Belanja Pegawai	15.388.678.000	14.882.541.056	96,71
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.296.965.134	6.090.740.737	96,73
-	Belanja Gaji Pokok ASN	4.585.895.651	4.541.874.280	99,04
-	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	492.935.722	467.585.193	94,86
-	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	288.815.000	238.615.000	82,62
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	175.948.000	173.520.000	98,62
-	Belanja Tunjangan Beras ASN	293.559.000	269.547.240	91,82
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.231.000	12.361.663	64,28
-	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.761	63.331	69,78
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	369.000.000	349.760.973	94,79
-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.400.000	9.353.182	75,43
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	40.600.000	28.059.875	69,11
-	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.490.000	-	0
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.741.000.000	4.482.237.603	94,54

BELANJA OPERASI	2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	4.741.000.000	4.631.330.366	94,54
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.047.714.416	4.006.566.597	98,98
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.804.898.416	3.798.477.597	99,83
- Belanja Honorarium	196.066.000	163.089.000	83,18
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD	46.750.000	45.000.000	96,26
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	302.998.450	302.996.119	99,99
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	302.998.450	302.996.119	99,99
Belanja Barang dan Jasa	12.753.239.500	12.390.601.068	97,16
Belanja Barang	4.357.603.500	4.163.050.094	95,54
- Belanja Barang Pakai Habis	4.357.603.500	4.163.050.094	95,54
Belanja Jasa	7.019.751.000	6.867.696.055	97,83
- Belanja Jasa Kantor	3.798.327.000	3.660.052.411	96,36
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	86.220.000	84.430.896	97,92
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	94.225.000	88.925.000	94,38
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	156.511.000	150.963.500	96,46
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	217.738.000	216.844.248	99,59
- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.666.730.000	2.666.480.000	99,99
Belanja Pemeliharaan	245.727.000	244.229.980	99,39
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.827.000	104.940.980	99,16
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.900.000	139.289.000	99,56
Belanja Perjalanan Dinas	1.130.158.000	1.115.624.939	98,71
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.130.158.000	1.115.624.939	98,71

b) Belanja Modal

Belanja Modal	2023		()	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68	3.868.250.000
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset tetap Lainnya	0	0	0	0
Belanja Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Jumlah	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68	3.868.250.000

Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp. 3.832.834.500 atau tercapai 99,68 dari anggaran sebesar Rp. 3.845.312.000. Dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp3.868.250.000 realisasi belanja modal tahun 2023 turun sebesar 0,92.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2023		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
.Belanja Tanah	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Aset Tak Berwujud	0	0	0
Jumlah	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68

B. Laporan Operasional

1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp170.959.452.898,54 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2023 (Rp) 31-12-2023	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
1	PAD – LO	169.837.405.898,54	161.151.346.750,75
2	Transfer – LO	0,00	-122.735.773.400,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	1.122.047.000,00	0
	Jumlah	170.959.452.898,54	38.415.573.350,75

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2023 naik sebesar Rp.132.543.879.547,79 atau sebesar 348,03% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Beban - LO

Realisasi Beban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp26.724.605.687,89 lebih kecil dari Beban tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan
BEBAN			
Beban Operasi	26.724.605.687,89	30.468.834.479,96	-3.744.228.792,07
Total Beban	26.724.605.687,89	30.468.834.479,96	-3.744.228.792,07

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp26.724.605.642,89 terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan ()
1	Beban Pegawai	14.409.036.740,00	14.865.896.435,00	-3,07
2	Beban Persediaan	3.653.200.049,00	4.135.979.424,00	-11,67
3	Beban Jasa	6.286.793.690,89	9.304.584.695,86	-32,43
4	Beban Pemeliharaan	75.695.500,00	104.940.980,00	-27,87
5	Beban Perjalanan Dinas	953.341.186,00	1.115.624.939,00	-14,55
6	Beban Subsidi	-	0	0
7	Beban Hibah	-	0	0
8	Beban Penyisihan Piutang	1.346.538.477,00	-614.307.966,90	0
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.556.115.973,00	-100,00
	Jumlah	26.724.605.642,89	30.468.834.479,96	-12,29

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban Operasi LO tahun 2023 turun sebesar Rp3.744.228.792,07 atau sebesar (12,29) dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.409.036.740

2. Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.635.200.094

3. Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.286.793.690,89

4. Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp75.695.500,00

5. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp953.341.186,00

6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.346.538.477,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	1.346.538.477,00	-614.307.966,90
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	1.346.538.477,00	-614.307.966,90

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 sebesar Rp.0 merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa beban penyusutan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1.151.666.222
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	338.110.179
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	22.512.456
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
	Jumlah	0	1.512.288.857

3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp0 merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar dan Devisit Penjualan Aset Non Lancar.

4. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp0.

5. Surplus/defisit – LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2023 sebesar Rp144.234.847.210,65 atau naik sebesar Rp149.844.682.169,86 dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Neraca

1. Aset

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp8.781.491.189** dan **Rp177.474.354.832,86** Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	ASET LANCAR	2023	2022
1	Kas di Kas Daerah	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	414.313,00	414.313,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Piutang Pajak Daerah	9.354.793.218,00	7.980.462.527,00
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.927.547.372,46	3.289.947.709,94
6	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
7	Penyisihan Piutang	(5.270.041.750,00)	(3.923.503.273,00)
8	Beban dibayar di muka	33.705.587,11	63.096.715,00
9	Persediaan	82.453.455,00	100.938.816,00
	JUMLAH	8.128.872.195,57	7.511.406.805,94

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp414.313. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

Per 31 Desember 2023 ada Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp414.313 di rekening penampungan PBB.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	BPKPD	0	-
2.			
	Jumlah	0	-

3) Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang sebesar Rp9.354.793.218 terdiri dari:

Piutang Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
a. Pajak Hotel	100.000	4.790.000
b. Pajak Restoran	11.903.485	27.837.993
c. Pajak Hiburan	7.185.929	2.400.000
d. Pajak Reklame	69.630.797	46.236.750
e. Pajak Penerangan Jalan	0	0
f. Pajak Parkir	2.347.200	4.790.000
g. Pajak Air Tanah	9.425.122	10.533.100
h. Pajak Sarang Burung Walet	0	0
i. Pajak MBLB	2.187.500	12.860.000
j. Piutang PBB-P2	9.228.513.185	7.870.564.684
k. Pajak BPHTB	23.500.000	500.000
Saldo Piutang Pajak	9.354.793.218	7.980.512.527

4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 disajikan bruto sebelum penyisihan piutang denda, piutang PAD yang sah sebesar Rp3.927.547.372,46 terdiri dari Piutang Dana Bergulir sebesar Rp624.230.401,00 dan Piutang Denda Pajak Daerah sebesar Rp3.303.316.917,46 sebagaimana rincian yang ditampilkan dalam table berikut:

Piutang Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
a. Pajak Hotel	2.000.000,00	12.000,00
b. Pajak Restoran	2.256.159,00	1.670.280,00
c. Pajak Hiburan	1.269.467,22	48.000,00
d. Pajak Reklame	10.502.548,86	6.852.813,00
e. Pajak Penerangan Jalan	0	0
f. Pajak Parkir	782.440,00	397.000,00
g. Pajak Air Tanah	884.186,00	1.034.614,00
h. Pajak Sarang Burung Walet	0	0
i. Pajak MBLB	2.678.928,00	159.300,00
j. Piutang PBB-P2	3.282.311.242,38	2.655.523.302,00
k. Pajak BPHTB	2.630.000,00	20.000,00
Saldo Piutang Pajak	3.303.316.917,46	2.665.717.309,00

5) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp5.270.041.750,00) merupakan Penyisihan Piutang Pajak Daerah dan Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah.

6) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka sebesar Rp.33.705.587,11 merupakan piutang atas premi asuransi kendaraan bermotor.

7) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp82.453.455 dan Rp100.938.816 .

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Adapun saldo persediaan sebesar Rp82.453.455 merupakan saldo persediaan atas barang pakai habis yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Audited) (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	82.453.455	100.938.816
2.	Bahan/Material	0	0
3.	Barang Lainnya	0	0
Jumlah		82.453.455	100.938.816

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp40.817.122.619 dan Rp25.519.153.500 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel berikut:

Rincian Aset Tetap

Aset Tetap	2023	2022
Tanah	13.179.621.800	10.097.263.540
Peralatan dan Mesin	18.824.075.009	17.903.777.240
Gedung dan Bangunan	28.447.850.076	17.152.536.986
Jalan, Irigasi dan Jaringan	760.978.268	760.978.268
Akumulasi Penyusutan	-20.395.402.534	-20.395.402.534
Jumlah Aset Tetap	40.817.122.619	25.519.153.500

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 bertambah Rp1.271.334.000 dari saldo awal yang sebesar Rp10.097.263.540 menjadi sebesar Rp11.368.597.540 nilai tanah tersebut merupakan tanah mutase dari SKPD lain.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 10.097.263.540
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 0
Mutasi dari SKPD lain	Rp 1.960.311.260
Hibah dari Komite/Banprov/Banpus	Rp 1.122.047.000
Belum Tercatat	Rp 0
Koreksi tambah Aset	
Total Tambah	Rp 3.082.358.260
Mutasi kurang:	Rp 0
Mutasi ke SKPD lain	Rp 0
penghapusan	Rp 0
Total kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	Rp13.179.621.800

Tanah yang tercatat di Neraca BPKPD terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah BPKPD	Rp1.045.025.000	Rp0	Rp.-	Rp1.045.025.000
2	PPKD	Rp9.052.238.540	Rp3.082.358.260	Rp.-	Rp12.134.596.800
	Jumlah	Rp10.097.263.540	Rp3.082.358.260	Rp.-	Rp13.179.621.800

Adapun Tanah BPKPD senilai Rp1.045.025.000 terletak pada :

No	Lokasi	Kecamatan	Luas (m ²)	Nilai Perolehan
1	Jl. Pahlawan No.02 Kebumen	Kebumen	5,661 m ²	473.850.000
2	Jl. Indrakila No. 05 Kebumen	Kebumen		571.175.000
	Jumlah			1.045.025.000

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp17.903.777.240 dan Rp 18.824.075.009. Secara keseluruhan peralatan dan mesin BPKPD bertambah dibandingkan tahun sebelumnya karena ada penambahan alat angkutan yang cukup besar.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp. 17.903.777.240
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 3.832.834.500
Mutasi dari SKPD lain	Rp 1.060.423.068
Belum Tercatat	Rp.0
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp.0
Total tambah	Rp 4.893.257.568
Mutasi kurang:	
Usul Hapus	Rp. 1.178.310.864
Rusak Berat	Rp.0
Mutasi ke SKPD lain	Rp. 2.256.083.935
Hibah	Rp. 538.565.000
Koreksi	
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total kurang	Rp 3.972.959.799
Saldo per 31 Desember 2023	Rp. 18.824.075.009

Adapun mutasi tambah sebesar Rp.4.893.257.568 merupakan belanja modal pada tahun 2023 BPKPD (detail terlampir). Nilai mutasi tambah sebesar Rp266.134.858 merupakan mutasi tambah peralatan dan mesin yang diterima dari SKPD lain serta pengembalian aset dari SKPD lain dan mutasi tambah peralatan dan mesin belum tercatat sebesar Rp358.270.000 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Alat Angkutan	2023	18	Unit	3.584.269.500	BPKPD
2	Alat Kantor dan Rumah tangga	2023	27	Unit	47.410.000	BPKPD
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2023	1	Unit	15.990.000	BPKPD
4	Komputer	2023	15	Unit	185.165.000	BPKPD
Jumlah			61	Unit	3.832.834.500	

Mutasi dari SKPD Lain

No	Nama Peralatan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1	Unit	11.067.210	BPKPD
2	Alat Angkutan	39	Unit	1.049.355.858	PPKD
Jumlah		0		1.060.423.068	

Belum Tercatat

No	Nama Peralatan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Alat Angkutan			0	PPKD
Jumlah				0	

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp1.178.310.864 merupakan aset dengan kondisi rusak berat/usul hapus dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Peralatan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Alat Besar	1	Unit	5.000.000	BPKPD
2	Alat Angkutan	1	Unit	3.000.000	BPKPD

No	Nama Peralatan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
3	Alat Angkutan	82	Unit	835.611.727	PPKD
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Unit	14.430.000	BPKPD
5	Alat Kantor dan Rumah tangga	13	Unit	58.234.642	BPKPD
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3	Unit	6.420.000	BPKPD
7	Komputer	15	Unit	255.614.495	BPKPD
Jumlah		35		1.178.310.864	

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp 2.256.083.935 merupakan mutasi Aset Peralatan dan Mesin ke Dinas lain.

Adapun data mutasi ke dinas lain sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Vol	Satuan	Harga perolehan	Ket
1	Alat Angkutan	19	Unit	673.044.435	PPKD
2	Alat Angkutan	9	Unit	1.583.039.500	BPKPD
3	Komputer	0	Unit	0	BPKPD
Jumlah		28		2.256.083.935	

Jumlah akhir aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.824.075.009 sebagaimana Mutasi berikut :

No	Jenis Barang	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Alat Besar	585.755.595	5.000.000	-	580.755.595
2	Alat Angkutan	10.099.866.195	3.633.260.662	4.633.625.358	11.100.230.891
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	42.430.000	14.430.000	-	28.000.000
4	Alat Kantor dan Rumah tangga	2.788.285.055	58.234.642	47.410.000	2.777.460.413
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	162.430.400	6.420.000	27.057.210	183.067.610
6	Alat Laboratorium	139.850.000	-	-	139.850.000
7	Komputer	4.026.562.523	255.614.495	185.165.000	3.956.113.028
8	Rambu-rambu	58.597.472	-	-	58.597.472
	Jumlah	17.903.777.240	3.972.959.799	4.893.257.568	18.824.075.009

3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.492.550.076 bertambah senilai Rp11.340.013.090 dari nilai Gedung dan bangunan tahun di akhir tahun 2022 senilai Rp17.152.536.986.

Saldo per 31 Desember 2022	Rp17.152.536.986
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp. 0
Mutasi dari SKPD lain	Rp11.216.563.090
Hibah Dari Komite/Banprop/Banpus	Rp. 0
Hasil Inventarisasi	Rp123.450.000
Total Tambah	Rp 11.340.013.090
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	Rp. 0
Rusak Berat	Rp. 0
Mutasi ke SKPD Lain	Rp. 0
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp. 0
Total Kurang	Rp. 0
Saldo per 31 Desember 2023	Rp28.492.550.076

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.492.550.076 terdiri dari gedung dan bangunan BPKPD di dua lokasi Jl. Pahlawan No.02 Kebumen dan Jl.Indrakila No. 05 dan juga Gedung bangunan PPK yang terdiri dari Gedung Bangunan Kantor, Rumah Sakit Umum, Gedung Olahraga, Gedung Perpustakaan, Tempat Ibadah dan Gedung Pertemuan Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bangunan Gedung (BPKPD)	7.235.922.410	-	-	7.235.922.410
	Bangunan Gedung (PPKD)	9.916.614.576	11.340.013.090	-	21.256.627.666
2	Monumen	-	-	-	-
3	Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Tugu Titik Kontrol / Pasti	-	-	-	-
	Jumlah	17.152.536.986	11.340.013.090	-	28.492.550.076

Gedung dan bangunan senilai Rp28.492.550.076 merupakan gedung dan bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan PPKD tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung/ Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Harga Perolehan	Ket
	BPKPD				7.235.922.410	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1995	1705	M2	2.846.431.997	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	1357.28	M2	2.119.614.035	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	274.87	M2	1.731.773.800	
4	Gedung Pos Jaga Permanen	2007	8	M2	25.340.000	
5	Gedung Pos Jaga Permanen	2009	8.6	M2	30.097.472	
6	Gedung Pos Jaga Permanen	2014	4	M2	15.103.758	
7	Gedung Garasi/Pool Permanen	2010	49.8	M2	16.285.240	
8	Gedung Garasi/Pool Permanen	2012	108.3	M2	15.357.630	
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2014	67.5	M2	11.258.020	
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2014	81	M2	45.311.273	
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2015	319.9	M2	35.790.560	
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2015	23.48	M2	13.134.675	
13	Taman lainnya	2019	20	M2	116.288.025	
14	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2019	56	M2	214.135.925	
	PPKD				21.256.627.666	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	32.2	M2	15.272.100	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	183.8	M2	19.299.000	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	73.8	M2	37.269.000	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	143.4	M2	40.300.000	
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	93.01	M2	46.970.050	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	228	M2	115.140.000	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2007	876	M2	492.880.000	

No	Nama Gedung/ Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Harga Perolehan	Ket
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	112	M2	429.334.440	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	120	M2	460.001.185	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	441.48	M2	79.300.000	
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	26.99	M2	200.115.000	
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	68.77	M2	199.333.000	
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	108.96	M2	192.489.000	
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2009	98.4	M2	10.479.600	
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2010	15	M2	16.056.000	
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2016	857	M2	92.390.723	
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2016	1316	M2	198.524.616	
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2016	5055	M2	221.360.675	
19	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	25	M2	12.625.000	
20	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	45	M2	22.725.000	
21	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	54	M2	27.270.000	
22	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	65	M2	65.650.000	
23	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	90	M2	45.450.000	
24	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	120	M2	60.600.000	
25	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	125	M2	63.125.000	
26	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	130	M2	65.650.000	
27	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	232	M2	234.320.000	
28	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	234	M2	118.170.000	
29	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	240	M2	121.200.000	
30	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	242	M2	122.210.000	
31	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	245	M2	123.725.000	
32	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	367	M2	185.335.000	
33	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	368	M2	185.840.000	
34	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	381	M2	192.405.000	

No	Nama Gedung/ Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Harga Perolehan	Ket
35	Bangunan Rumah Sakit Umum	2002	900	M2	454.500.000	
36	Bangunan Rumah Sakit Umum	2003	400	M2	202.000.000	
37	Bangunan Rumah Sakit Umum	2005	112	M2	12.120.000	
38	Bangunan Rumah Sakit Umum	2005	488	M2	46.840.200	
39	Bangunan Rumah Sakit Umum	2005	576	M2	48.398.101	
40	Bangunan Rumah Sakit Umum	2006	26	M2	13.259.100	
41	Bangunan Rumah Sakit Umum	2006	66	M2	132.092.000	
42	Bangunan Rumah Sakit Umum	2006	156	M2	201.198.200	
43	Bangunan Rumah Sakit Umum	2006	120	M2	240.168.000	
44	Bangunan Rumah Sakit Umum	2006	208	M2	267.232.500	
45	Bangunan Rumah Sakit Umum	2007	2	M2	18.726.000	
46	Bangunan Rumah Sakit Umum	2007	32	M2	32.000.000	
47	Bangunan Rumah Sakit Umum	2007	252	M2	48.398.100	
48	Bangunan Rumah Sakit Umum	2007	155	M2	96.000.000	
49	Bangunan Rumah Sakit Umum	2007	108	M2	397.001.000	
50	Bangunan Rumah Sakit Umum	2008	60	M2	30.300.000	
51	Bangunan Rumah Sakit Umum	2008	48	M2	53.515.410	
52	Bangunan Rumah Sakit Umum	2008	60	M2	494.112.000	
53	Bangunan Rumah Sakit Umum	2008	1245	M2	628.540.000	
54	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	2013	304	M2	1.616.037.744	
55	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2016	6337	M2	249.421.832	
56	Gedung Garasi/Pool Permanen	2002	25	M2	10.725.000	
57	Gedung Garasi/Pool Permanen	2002	45	M2	19.305.000	
58	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2002	125	M2	76.760.000	
59	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2002	30	M2	15.150.000	

No	Nama Gedung/ Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Harga Perolehan	Ket
60	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1999	200	M2	10.000.000	
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	83	M2	41.915.000	
62	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1999	127	M2	50.000.000	
63	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2013	150	M2	123.450.000	
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1993	116	M2	138.000.000	
65	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2002	242	M2	150.995.000	
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1999	110	M2	200.000.000	
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	248	M2	309.345.635	
68	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1974	179.45	M2	343.986.950	
69	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2018	225	M2	344.249.033	
70	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	454	M2	476.635.000	
71	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	252	M2	529.335.000	
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1974	200	M2	547.631.000	
73	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	2600	M2	766.819.622	
74	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	500	M2	820.365.600	
75	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	216	M2	824.113.000	
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	228	M2	1.124.628.250	
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	126	M2	1.142.936.000	
78	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	594	M2	1.625.885.000	
79	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015		M2	1.769.723.000	
Jumlah					28.492.550.076	

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp760.978.268 dan Rp760.978.268

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 760.978.268
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 0
Mutasi dari SKPD LAIN	Rp 0

Koreksi Tambah/reklas aset	Rp 0
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp 0
Rusak Berat	Rp 0
Mutasi ke SKPD Lain	Rp 0
Koreksi/reklas aset	Rp 0
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 760.978.268

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp760.978.268 merupakan Jaringan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen (BPKPD) dan PPKD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Jalan, Jaringan dan Irigasi (BPKPD)	616.502.268	-	-	616.502.268
2	Jalan, Jaringan dan Irigasi (PPKD)	144.476.000	-	-	144.476.000
Jumlah		760.978.268	-	-	760.978.268

5) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada BPKPD TA.2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (20.395.402.534) dan Rp (20.395.402.534) BPKPD tahun 2022 merupakan tahun ke-5 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke accrual basis, sehingga tahun 2023 merupakan tahun ke-6 dalam melakukan penyusutan.

c. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 3.676.780.154 dan Rp 3.676.780.154.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

1) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 575.311.000 dan Rp 575.311.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 575.311.000
Mutasi tambah:	
Pembelian Software	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 575.311.000

2) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp3.777.637.791 dan Rp. 3.416.212.154 Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat ini . Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 3.416.212.154
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 1.178.310.864
Mutasi dari SKPD Lain	Rp 138.309.000
Koreksi	Rp 0
Reklas	Rp 0
Total Tambah	Rp 0
Mutasi kurang:	Rp 0
Penghapusan Aset	Rp 845.194.227
Rusak Berat	Rp 0
Mutasi ke SKPD lain	Rp 110.000.000
Koreksi	Rp 0
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	Rp3.777.637.791

Koreksi tambah sebesar Rp.0 merupakan koreksi atas rusak berat Peralatan Mesin, karena penghapusannya baru dilakukan tahun 2023. Sedangkan untuk reklas tambah dari Aset Tetap Peralatan Mesin senilai

Rp.0 merupakan penambahan atas aset lainnya berupa barang rusak berat.

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	-	-	-	-	0	
	Jumlah				0	

Penghapusan sebesar Rp. 0 merupakan penghapusan atas Alat Angkutan senilai Rp. 0 merupakan penghapusan aset pada Alat Angkutan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Qty	Tahun Perolehan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	-	-	-	0	
	Jumlah			0	

2. Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp1.086.401.929,00 dan Rp1.032.678.638,02.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan diterima Dimuka	737.364.393,00	643.295.044,02
2	Utang Belanja	351.687.536,00	389.383.594
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
	Jumlah	4.038.205.791,00	1.032.678.638,02

1) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2023 diterima SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Pajak Reklame Permanen	494.406.838
2	Pajak Reklame Non Permanen	40.754.032
3	Pendapatan Diterima dimuka (Sewa)	202.203.523
JUMLAH		737.364.393

2) Utang Belanja

Utang Belanja merupakan belanja yang seharusnya dibayarkan tahun 2023 namun direalisasikan di tahun 2024. Utang Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023 disajikan dalam table berikut:

No	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Belanja Telepon	120.919
2	Belanja Air	2.611.950
3	Belanja Listrik	21.786.000
4	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	327.168.667
JUMLAH		351.687.536

3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.235.088.937.144,72 dan Rp.218.865.800.290,07.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp.218.865.800.290,07

2. Surplus/Defisit-LO Rp144.234.847.210,65

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi ekuaitas Rp10.704.513.256,00

4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan (Rp138.716.223.612,00)

5. Ekuitas Akhir Rp.235.088.937.144.72



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen terletak di sebelah utara Alun-Alun Kabupaten Kebumen dan beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 02 Kebumen dan Jalan Indrakilla Nomor 05 Kebumen dengan alamat website <https://bpkpd.kebumenkab.go.id>.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok BPKPD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
2. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;

4. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
6. pelaksanaan administrasi Badan;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Badan; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. BPKPD Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan OPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka BPKAD berdasarkan tupoksi yang diamanatkan telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan dan diselaraskan dengan RPJM Kabupaten tahun 2021-2026.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai sasaran - sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 maka strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh BPKPD sebagai berikut :

1. Kebijakan :

Peningkatan akuntabilitas system pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan

2. Strategi

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas Keuangan dan Pendapatan daerah.

b. Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh

satu Sekretaris dengan dua Kepala Sub Bagian, enam Kepala Bidang dengan dua belas Kepala Subbidang sebagai berikut:

I. Susunan Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Sekretariat, membawahi:
 - 2.1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 3.1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 3.2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 4.1. Sub Bidang Belanja;
 - 4.2. Sub Bidang Kas Daerah.
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 5.1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 5.2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
6. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - 6.1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah;
 - 6.2. Sub Bidang Analisa Dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
7. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - 7.1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - 7.2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan BPKPD Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Kebumen, Desember 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001